

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut Zahra (2022), UMKM merupakan salah satu prioritas pengembangan yang ada di setiap negara. UMKM tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan omzet tahunan, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah.

1. Usaha Mikro adalah bisnis atau usaha yang dimiliki perorangan dan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. $\text{Aset} \leq \text{Rp } 50.000.000$. Memiliki kekayaan bersih kurang dari sama dengan lima puluh juta rupiah.
 - b. $\text{Omzet} \leq \text{Rp } 300.000.000$. Memiliki hasil pendapatan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah.
2. Usaha kecil adalah jenis usaha produktif yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan menjadi merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha skala menengah maupun skala besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. $\text{Rp}50.000.000 < \text{Aset} \leq \text{Rp}500.000.000$. Memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak lima ratus juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau
 - b. $\text{Rp}300.000.000 < \text{Omzet} \leq \text{Rp}2.500.000.000$. Memiliki hasil pendapatan tahunan lebih dari tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak dua milyar lima ratus juta rupiah.
3. Usaha Menengah adalah jenis usaha yang berdiri sendiri, dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dalam skala kecil maupun besar yang memenuhi kriteria berikut:

- a. $\text{Rp}500.000.000 < \text{aset} \leq \text{Rp}10.000.000.000$. Memiliki kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak sepuluh milyar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau
- b. $\text{Rp}2.500.000.000 < \text{Omzet} \leq \text{Rp}50.000.000.000$. Memiliki hasil pendapatan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak lima puluh milyar rupiah.

Kriteria tersebut tidak hanya digunakan oleh pemerintah untuk tujuan pengaturan dan kebijakan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan program pembinaan dan pemberdayaan UMKM secara nasional.

Selain klasifikasi berdasarkan nilai aset dan omzet, UMKM juga dibedakan berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), usaha mikro biasanya memperkerjakan 1-4 orang, usaha kecil 5-19 orang, dan usaha menengah 20-99 orang. Di atas itu dikategorikan sebagai usaha besar yang memperkerjakan lebih dari 100 orang.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia. Tidak hanya dari sisi kontribusi ekonomi makro, UMKM juga berperan sebagai agen pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan dan pinggiran kota, di mana perusahaan besar belum tentu beroperasi.

Namun demikian, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan akuntansi, keterbatasan akses terhadap pembiayaan perbankan, dan kurangnya kemampuan dalam pengelolaan bisnis secara efisien. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah lemahnya pencatatan keuangan serta ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Hal ini menjadi alasan utama disusunnya SAK EMKM oleh IAI.

2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan di kalangan pelaku UMKM, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyusun dan meresmikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tanggal 18 Mei 2016. Standar ini mulai diberlakukan secara efektif sejak 1 Januari 2018, dan dirancang secara khusus untuk menjawab kebutuhan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

SAK EMKM merupakan penyederhanaan dari SAK ETAP, yang sebelumnya menjadi rujukan utama bagi entitas kecil dan menengah. Namun, seiring berkembangnya dunia usaha dan temuan bahwa SAK ETAP masih dianggap rumit bagi sebagian besar UMKM, maka SAK EMKM hadir sebagai solusi yang lebih praktis. Menurut Pratama dan Indrawati (2021), SAK EMKM merupakan standar baru yang menjadi acuan dan rujukan bagi para pelaku UMKM dalam menerapkan pencatatan keuangan yang sesuai standar yang berlaku.

SAK EMKM mengatur penyusunan laporan keuangan secara ringkas, dengan hanya mencakup tiga jenis laporan, yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Tujuan dari SAK EMKM adalah untuk membantu UMKM yang belum mampu menyusun laporan keuangan dengan standar akuntansi penuh agar tetap dapat menyajikan laporan keuangan yang relevan, dapat dibandingkan, dan andal. Menurut Lestari et.al (2023), penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan berdampak pada peningkatan keandalan laporan keuangan tersebut. Menurut Utari (2021), tujuan dari SAK EMKM adalah membantu EMKM untuk menyediakan data-data posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas yang akan berguna bagi sebagian besar pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomik terkait entitas tersebut. Standar ini menggunakan pendekatan berbasis akrual dan

biaya historis sebagai dasar pengukuran seluruh pos keuangan. Hal ini dipilih karena yang paling sesuai dengan kapasitas pencatatan dan kemampuan teknis mayoritas UMKM.

SAK EMKM juga dikhususkan bagi entitas yang:

- Tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan kepada publik.
- Tidak memiliki instrumen keuangan kompleks.
- Tidak memiliki struktur kepemilikan yang rumit seperti perusahaan terbuka.

Bahasa dan penyajian dalam SAK EMKM dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh pelaku usaha yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Standar ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan tata kelola keuangan UMKM dan memperluas akses mereka terhadap pendanaan formal, terutama perbankan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM secara bertahap mulai meningkat di kalangan UMKM, terutama setelah didorong oleh program pelatihan dari pemerintah dan kampus melalui pengabdian masyarakat.

2.3 Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan komponen inti dari proses akuntansi yang menggambarkan posisi dan kinerja keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan ini tidak hanya menjadi alat kontrol internal, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan penting bagi pihak eksternal dalam mengambil keputusan ekonomi, seperti kreditor, investor, dan lembaga keuangan.

Menurut Afriansyah et.al (2021), laporan keuangan adalah laporan yang berisi data pencatatan uang dan transaksi yang terjadi di dalam bisnis baik itu penjualan maupun pembelian ataupun transaksi lainnya yang dinilai memiliki nilai ekonomis dan moneter. Menurut Tatik (2024), Laporan Keuangan adalah dokumen atau laporan yang memberikan gambaran kondisi keuangan suatu entitas,

seperti perusahaan, organisasi, atau individu dalam suatu periode tertentu. Secara umum, laporan ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

- Laporan Laba Rugi
- Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- Laporan Perubahan Modal
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Namun dalam konteks UMKM, penyusunan Laporan Keuangan cenderung lebih sederhana. Menurut SAK EMKM, Laporan Keuangan UMKM minimal harus menyajikan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini dirancang agar selaras dengan kemampuan pencatatan dan kebutuhan informasi pelaku usaha kecil dan mikro, yang sebagian besar belum menggunakan sistem akuntansi berbasis teknologi atau tenaga profesional.

berdasarkan pendapat Kasmir (2022), Laporan Keuangan merupakan alat yang berfungsi untuk:

1. Mengevaluasi performa bisnis suatu perusahaan
2. Mengidentifikasi kondisi keuangan organisasi
3. Menjadi fondasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan penting bagi pihak manajemen dan stakeholder

Dalam beberapa studi terkini, seperti yang dilakukan oleh Embu et.al (2024), ditemukan bahwa banyak UMKM masih belum menerapkan prinsip-prinsip SAK EMKM dalam pelaporan keuangannya. Laporan Keuangan yang dibuat sering kali digabungkan dengan keuangan pribadi, serta tidak mengikuti struktur standar yang berlaku.

Penelitian oleh Sya'ban et.al (2023) menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman pelaku ukm terhadap SAK EMKM seperti, tingkat pendidikan para pelaku ukm terhadap standar akuntansi yang berlaku dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun pihak terkait mengenai standar akuntansi keuangan. Luciana dan Gunawan (2021) menyebutkan bahwa Laporan Keuangan berbasis SAK EMKM sangat diperlukan

ketika UMKM mengajukan kredit atau membutuhkan dukungan pembiayaan lainnya.

Selain itu, Izzaty dan Solovida (2023) dalam penelitiannya menyoroti pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan UMKM. Penggunaan aplikasi sederhana seperti Microsoft Excel atau aplikasi pencatatan keuangan dapat meningkatkan ketepatan penyusunan laporan serta memperbaiki tata kelola keuangan UMKM secara keseluruhan. Proses digitalisasi dalam penyusunan laporan keuangan merupakan langkah penting dan relevan bagi UMKM di era digital saat ini. Menurut penelitian Haryati (2025) pemanfaatan teknologi oleh pelaku UMKM dalam proses penyusunan laporan keuangan menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun tingkat adopsinya masih beragam. Semakin banyak UMKM yang mulai meninggalkan metode pencatatan manual dan beralih ke penggunaan alat bantu sederhana seperti Microsoft Excel maupun aplikasi berbasis digital lainnya, seperti SIAPIK dan Bukukas. Penggunaan teknologi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi, ketepatan pencatatan, dan mempermudah proses pelaporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan yang lebih terstruktur juga memperbesar peluang UMKM untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal. Meski demikian, kendala seperti rendahnya literasi digital serta minimnya pelatihan teknis masih menjadi hambatan utama dalam penerapan teknologi secara merata. Selain itu, digitalisasi yang tidak didukung oleh sistem pencatatan dan pemahaman akuntansi yang memadai akan menyulitkan proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Dalam kasus JOJO LAUNDRY, digitalisasi yang dilakukan memfasilitasi pengumpulan data transaksi secara *real time*, namun untuk data yang dikumpulkan belum diolah menjadi laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa pelatihan dan pendampingan berkelanjutan agar lebih banyak pelaku UMKM mampu mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan keuangan usahanya dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Dengan demikian, Laporan Keuangan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan kepercayaan pihak luar

terhadap UMKM mempermudah akses pembiayaan, dan memperkuat landasan perencanaan usaha ke depan.

2.4 Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Penyusunan Laporan Keuangan bagi UMKM berdasarkan SAK EMKM merupakan upaya untuk memberikan pedoman akuntansi yang sederhana namun tetap memenuhi unsur relevansi dan keandalan informasi keuangan. Standar ini membantu entitas skala kecil untuk menyusun Laporan Keuangan secara sistematis dan konsisten.

Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan SAK EMKM wajib terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Setiap bagian memiliki struktur dan unsur-unsur yang telah ditentukan, serta menggunakan biaya historis sebagai dasar pengukuran. Ini artinya, nilai yang digunakan dalam laporan merupakan nilai perolehan asli dari transaksi, bukan nilai pasar saat ini.

2.4.1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan ini menunjukkan posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada suatu titik waktu tertentu. Ketiga elemen tersebut didefinisikan dalam SAK EMKM sebagai berikut:

- Aset: Sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang.
- Liabilitas: Kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan menyebabkan arus keluar sumber daya entitas.
- Ekuitas: Hak residual atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas.

Laporan Posisi Keuangan sangat penting karena menjadi indikator stabilitas dan struktur modal usaha. Berdasarkan penelitian Komala (2024), Laporan Posisi Keuangan dapat membantu pelaku UMKM untuk memahami sejauh mana usaha mereka bergantung pada utang atau pendanaan internal.

2.4.2 Laporan Laba Rugi

Laporan ini menyajikan kinerja keuangan entitas selama periode tertentu. Informasi yang disampaikan meliputi:

- Pendapatan: Kenaikan manfaat ekonomi selama periode berjalan berupa peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan peningkatan ekuitas.
- Beban: Penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengurangi ekuitas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanati dan Budiantara (2023), laporan keuangan khususnya laba rugi adalah pondasi utama suatu usaha, maka akan sulit bagi UMKM untuk mengetahui kondisi keuangan usahanya tanpa laporan keuangan yang sesuai, seperti sulitnya mengetahui keuntungan ataupun kerugian, kesulitan dalam mengelola keuangan usahanya, dan juga akan sulit dalam memperoleh pendanaan dari pihak investor karena kurangnya informasi yang diperlukan untuk mengecek kelayakan bisnis.

2.4.3 Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap laporan utama. Informasi yang perlu disajikan dalam CALK meliputi:

- Pernyataan kepatuhan terhadap SAK EMKM.
- Ringkasan kebijakan akuntansi yang digunakan.
- Penjelasan terhadap pos-pos tertentu dalam laporan keuangan.
- Informasi tambahan sesuai karakteristik entitas.

Catatan ini sangat berguna bagi pengguna laporan keuangan seperti mitra usaha, bank, atau investor, karena memberikan konteks tambahan yang tidak dapat diperoleh dari laporan angka saja. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian Satria dan Hendyka (2021) pemakai laporan keuangan diharapkan untuk merujuk pada catatan atas laporan keuangan guna mendapatkan pemahaman atas laporan keuangan yang lebih mendalam.

SAK EMKM menetapkan bahwa semua unsur dalam Laporan Keuangan diukur menggunakan biaya historis. Biaya historis adalah nilai aktual transaksi

pada saat perolehan aset atau pengakuan kewajiban. Hal ini memudahkan UMKM dalam menyusun laporan karena tidak perlu melakukan estimasi atau penilaian ulang aset, seperti dalam standar akuntansi yang lebih kompleks.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM tidak hanya memberikan kemudahan secara teknis, tetapi juga membantu pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi usaha. Digitalisasi pelaporan dengan alat bantu sederhana seperti spreadsheet atau aplikasi pencatatan juga semakin meningkatkan kemampuan UMKM untuk menyusun laporan yang lebih akurat dan tepat waktu.

2.5 Perbedaan SAK EMKM dan SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dirancang sebagai bentuk penyederhanaan dari SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), yang sebelumnya digunakan oleh entitas kecil dan menengah di Indonesia. Meskipun keduanya ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, SAK EMKM memberikan pendekatan yang lebih sederhana dan praktis untuk pelaku UMKM, terutama yang belum memiliki sumber daya akuntansi yang memadai.

Beberapa perbedaan utama antara SAK EMKM dan SAK ETAP dapat dilihat pada aspek berikut:

Table 2.1 Perbedaan SAK EMKM dan SAK ETAP

Aspek	SAK ETAP	SAK EMKM
Ruang Lingkup	Untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang lebih kompleks	Untuk entitas mikro, kecil, dan menengah (sederhana) yang tidak go publik
Basis pengukuran	Menggunakan biaya historis dan nilai wajar	Hanya menggunakan biaya historis
Laporan keuangan wajib	5 laporan (termasuk perubahan ekuitas dan	3 laporan utama saja (Laba Rugi, Neraca,

Aspek	SAK ETAP	SAK EMKM
	arus kas)	CALK
Tingkat kompleksitas	Relatif kompleks untuk UMKM	Sangat sederhana dan aplikatif
Pencatatan ekuitas	Diperlukan Laporan Perubahan Ekuitas	Tidak wajib disajikan
Laporan arus kas	Wajib disusun dengan metode langsung/tidak langsung	Tidak diwajibkan
Penyajian laba rugi	Mencakup lebih banyak komponen termasuk laba investasi	Cukup menyajikan pendapatan dan beban pokok
Pengungkapan informasi	Lebih lengkap, termasuk aset dan liabilitas pajak	Informasi disederhanakan, fokus pada hal-hal pokok saja

SAK EMKM jauh lebih mudah diimplementasikan oleh pelaku UMKM dibandingkan SAK ETAP, karena penyajiannya yang ringkas dan hanya mencakup informasi dasar yang memang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro. Di sisi lain, SAK ETAP dianggap terlalu memberatkan bagi UMKM karena mengharuskan adanya pencatatan yang mendalam terhadap aset tetap, perubahan ekuitas, serta informasi nilai wajar, yang tidak semuanya dapat diidentifikasi dengan jelas dalam praktik UMKM.

Perlu dicatat bahwa mulai 1 Januari 2025, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) secara resmi menggantikan SAK ETAP dengan standar baru yang disebut SAK Entitas Privat (SAK EP). SAK EP mengacu pada IFRS for SMEs versi 2015 dan ditujukan bagi entitas privat yang lebih besar dari UMKM namun belum termasuk entitas publik. Tujuannya adalah untuk menyediakan standar yang relevan bagi perusahaan yang memiliki struktur keuangan lebih kompleks namun tidak wajib mengikuti SAK umum atau IFRS penuh.

Namun, dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada UMKM, standar yang digunakan tetap merujuk pada SAK EMKM karena SAK EP tidak ditujukan untuk entitas skala mikro dan kecil. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perbandingan antara SAK EMKM dan SAK ETAP tetap relevan, terutama dalam melihat transisi historis dan penyederhanaan yang dilakukan oleh IAI untuk menjawab kebutuhan akuntansi pelaku UMKM.